

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam maupun kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, kekayaan tersebut tumbuh dari struktur masyarakat yang heterogen sehingga banyak unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dari satu dan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek Ras, Agama, Suku, Bahasa, maupun Adat Istiadat, simbol-simbol primordial ini kemudian menyatuh menjadi sebuah rumah besar yang disebut dengan negara Indonesia, kesamaan nasib dan tujuan menyatukan persepsi dari segenap masyarakat yang lahir di tanah nusantara untuk kemudian bersatuh padu membentuk bangsa yang merdeka atas penjajahan yang menindas kehidupan masyarakat.

Dewasa ini, perbedaan yang ada tersebut tidak hanya menjadi sebuah kekayaan bagi bangsa Indonesia akan tetapi perbedaan tersebut berevolusi menjadi sebuah tantangan besar bagi segenap bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan satu tujuan yang sama. Tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan akan menimbulkan konflik diantara kelompok-kelompok primordial tersebut, adanya perbedaan ciri-ciri tersebut seringkali terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok superior terhadap kelompok inferior. Seringkali terjadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan konflik antar golongan, relasi kuasa yang digunakan

menimbulkan intimidasi terhadap kaum minoritas. “Klaim superioritas ras, pembalasan dendam, ketidakseimbangan psikologi pada pikiran kepemimpinan dan ketiadaan perasaan spiritual tentang tanggung jawab terhadap kekuasaan ilahi” (Arsyad, 2022: 86). Tindakan semacam itu telah melanggar Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia menginginkan untuk hidup dengan aman dan nyaman

Kembali kepada peran negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh masyarakat mempunyai kewajiban dalam menjamin Hak Asasi setiap warga Negara, Hak untuk hidup, Hak mendapatkan pekerjaan, Hak kebebasan, Hak berbicara dan berpendapat serta Hak dalam menganut suatu kepercayaan tertentu (agama). Berangkat dari keadaan tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional telah melakukan gerakan dengan melakukan diskusi memberikan atensi mengenai Hak Asasi Manusia, “dari pertemuan itu telah menghasilkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Deklarasi Wina pada tahun 1966”. (Budiarjo, 2008: 211)

Hasil dari diskursus tersebut telah menyepakati bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sifat yang telah melekat dalam diri setiap manusia yang dibawa sejak lahir hingga kemudian dia meninggalkan dunia ini, dalam keadaan tersebut pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memberikan jaminan konstitusional mengenai Hak Asasi Manusia karena begitu sangat penting dan bahkan merupakan salah satu ciri utama dianutnya prinsip Negara hukum dalam suatu Negara tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Sir Ivor Jennings

bahwasanya “suatu Negara dapat dianggap mempunyai konstitusi apabila dalam konstitusi tersebut memuat adanya ketentuan mengenai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia” (Atmadja, 2015: 11)

Dewasa ini sering kita temukan propaganda yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu, menciptakan polarisasi ditengah-tengah masyarakat agar tujuan dari praktik-praktik kepentingan tertentu dapat tercapai. di beberapa media kita dapat menemukan banyak sekali propaganda seputar isu rasisme yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan yang sangat fatal. Seperti halnya kasus tokoh Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada tahun 2021, kasus ini dianggap sebagai luka yang mendalam bagi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan, “rasisme terhadap manusia Papua adalah konstruksi sosial yang sudah disediakan oleh wacana tentang ‘ras kulit putih beradap’ versus ‘ras kulit hitam tak beradap’ (Afriza, 2021: 2)

Kasus lain yang mengakibatkan kerusuhan sehingga menelan banyak korban jiwa dalam rentetan sejarah konflik SARA di negara yakni konflik suku Dayak dengan suku Madura pendatang di Sambas Kalimantan Barat tahun 1999, suku Dayak dengan suku Madura pendatang di Kalimantan Tengah tahun 2001, Penganut Agama Kristen Timur-Timur melawan Butan, Bugis dan Makassar di Kupang tahun 1999, Kristen Ambon melawan Butan, Bugis dan Makassar 1999 dan berakhir dengan konflik agama, konflik Agama antar Kristen dan Islam di Poso Sulawesi Tengah tahun 2001. (Marzali, 2003: 15)

Isu agama merupakan hal yang sangat mudah untuk dibenturkan karena hal tersebut bersifat sensitif berkaitan dengan keyakinan seseorang. “walaupun hanya karena adanya perbedaan tentang konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama” (Firdaus, 2014: 217) dalam dua dekade terakhir ini banyak peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia dimulai dari peristiwa “bom Bali tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi tempat wisata. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sepanjang sejarah Indonesia” (<https://id.wikipedia.org>: 2022)

Tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis yang memiliki pandangan ekstrem, tetapi peristiwa yang terjadi tidak datang dari keadaan hampa, melainkan banyak faktor pendukung yang mengakibatkan seseorang berani melakukan tindakan tersebut, ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang berani melakukan tindakan bom bunuh diri atau menjadi teroris, pertama karena diakibatkan dari adanya rasa termarginalkan dalam kehidupannya, rasa keadilan yang belum didapatkan, terintimidasi, dan ketimpangan sosial. Sehingga muncul perasaan untuk melawan terhadap sistem yang tidak proporsional dan juga keinginan untuk memperbaiki sistem tersebut dengan berlandaskan kepada ideologi mereka yang dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan tindakan tersebut. kedua, diakibatkan dari fenomena kehidupan masyarakat yang cenderung liberal dan sekuler, jauh dari nilai-nilai

ajaran agama Islam, seperti yang disampaikan Sujatmiko, dkk (2017:5) dalam buku membongkar Narasi Terorisme Dalam Bungkus Agama ia menjelaskan bahwasanya :

“kemunculan *Jamaah Islamiyah* yang muncul di Timur Tengah pada awal abad ke-20 mengusung ide khilafah untuk mengembalikan kejayaan umat Islam sebelumnya dalam upaya menangkal pengaruh nasionalisme dan demokrasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam” (Sujatmiko, dkk, 2017: 5)

Keberadaan paham Islam fundamentalis ini menjadi tantangan terhadap keutuhan Negara, bahkan penyebaran paham Islam fundamentalis ini merambat ke daerah-daerah. Sumenep sebagai daerah yang memiliki kultur keagamaan yang sangat kuat mampu diterobos oleh adanya paham Islam fundamentalis ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penangkapan warga setempat yang terindikasi menjadi bagian dari jaringan gerakan Islam fundamentalis. “hal tersebut dibenarkan oleh pihak kepolisian setempat dengan adanya penangkapan tiga orang warga terduga terlibat jaringan terorisme oleh Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di Sumenep, Jawa Timur, Jumat (28/10/22) (<https://www.jawapos.com>, 2022)

Lahirnya konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia merupakan sebuah konflik yang cukup menarik perhatian masyarakat, mengapa demikian karena konflik tersebut tidak hanya lahir karena adanya sekte tertentu melainkan kurangnya perhatian dari sisi kebijakan ekonomi politik pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh sehingga berujung kemiskinan, dalam *Jambura History and Culure Journal* Hany Nurpratiwi menguraikan bahwasanya dalam sejarah perjuangan

kemerdekaan Negara Indonesia kontribusi masyarakat Aceh cukup dominan seperti saat “Indonesia menyambut kemerdekaan yang ke-3 Aceh memberikan bantuan 2 pesawat terbang dan pada tahun 1949 rakyat Aceh memberikan bantuan uang kontan senilai 250.000 dolar AS” untuk keperluan pemerintah Indonesia pada saat itu. (Nurpratiwi, 2019: 97) Sehingga masyarakat Aceh mengharapkan politik balas budi dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan berlandaskan Syariat Islam. Sehingga saat ini Aceh menjadi daerah otonomi yang menjalankan pemerintahan berlandaskan Syariat Islam

Konflik yang cukup menarik untuk kita uraikan yaitu peristiwa konflik pasca pemilihan presiden tahun 2019 yang mengakibatkan polarisasi diantara dua kubu pendukung capres dan cawapres, pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan DPR, DPRD. Hal ini terjadi apabila masing-masing dari tim sukses melakukan kampanye dengan bersifat SARA yakni menonjolkan suku, daerah, agama yang dianut sehingga secara tidak langsung mereka para pemilih akan memilihnya sesuai faktor kesamaan tersebut. Keadaan dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yakni kandidat nomor urut 01 berasal dari masyarakat sipil dan kiai yang beragama Islam. Sedangkan pasangan calon nomor urut 02 berasal dari militer dan memiliki keluarga Kristen.

Jika kemudian para kandidat menggunakan politik identitas, pasangan calon nomor urut 01 akan melakukan pendekatan dengan orang muslim sedangkan pasangan calon nomor urut 02 akan mendekati orang non-muslim

dan akan memainkan isu seputar identitas yang dimilikinya sebagai propaganda dalam meraup suara. Keadaan tersebut seperti yang dijelaskan dalam artikel puskapol universitas Indonesia yang berjudul Politik identitas dalam kampanye pemilu 2019. Konteks kontestasi saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini merupakan residu dari tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta pada tahun 2017. Yang hal ini diprediksikan akan berlanjut pada pemilihan umum berikutnya. (Hurriyah, 2019: 3)

Memang pada kenyataannya calon presiden dan wakil presiden menggunakan politik identitas. Hal ini dapat dibuktikan dari hal atau lingkup kecil yaitu isu-isu dalam *cyber war* kedua tim yang dimainkan dari kubu 01 mengatakan “jama’ah monaslimin” untuk menyerang kubu lawannya, kemudian dari kubu 02 mengatakan “Islam nusantara dan penyembah kuburan” untuk menyerang lawannya. Dari *cyber war* propaganda media juga dapat dilihat pada konflik yang terjadi yang telah menyebar di media maupun diproses ke ranah hukum terjadi saling melaporkan antara pendukung dari pemilih.

Tim sukses sebagai penggerak massa penting ada di sebuah pemilihan karena ikut berperan aktif dalam kampanye mulai dari penyebaran pamflet di media sosial, presentasi visi-misi di berbagai tempat, dan memasang selebaran yang berisi tentang visi-misi program kerja dari figur yang diusung dan foto kandidat di papan iklan dan di rumah-rumah dan dimanapun tempat yang dapat dijangkau orang. Kampanye dilakukan agar para pemilih lebih mengenal pasangan calon, visi-misi, karakter, cara berbicara. Dari hal tersebut para

pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan dapat menentukan pemimpin yang hendak dipilihnya sesuai dengan hati nurani mereka tanpa ada paksaan. Kemudian hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat masih peduli terhadap proses demokrasi akan tetapi beraneka ragam konflik pasti muncul saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden terutama isu yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA)

Setiap gelaran pesta demokrasi yang dilaksanakan banyak terjadi penyimpangan dalam proses kampanye (*black campaign*) diantaranya penyebaran berita bohong (*Hoaks*), praktik politik uang (*money politic*), sehingga dengan terjadinya kampanye hitam ini banyak mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya, secara yuridis larangan politik uang telah diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (a) sampai (j) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jika kemudian budaya politik uang ini terus terjadi setiap gelaran pesta demokrasi maka kemungkinan besar akan terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah, karena dalam mencapai sebuah kekuasaan tersebut seorang calon mempromosikan diri bukan melalui adu ide dan gagasan untuk kemaslahatan melainkan menggunakan strategi politik uang. Sehingga tidak menutup kemungkinan dia ingin meraup kembali biaya politik tersebut dengan mengambil anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan. “Maka perlu adanya pencegahan dengan melalui Pendidikan politik agar tidak terjadi korupsi politik saat pemilihan umum” (Trias Pahlevi, 2020: 147)

Hubungan ini kemudian berlaku terhadap masyarakat sebagai unsur utama dalam negara yang mempunyai hak kostitusional sebagai warga negara,

dalam sistem pemerintahan demokrasi warga negara tentunya mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dengan kata lain mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih pemimpinnya. Pendidikan politik dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara memahami politik, ikut serta berpartisipasi dalam konstestasi politik sehingga dapat menimalisir terjadinya golput (golongan putih) dan dapat mempengaruhi keputusan politik dengan baik, secara umum banyak pandangan atau perilaku yang mempengaruhi pemilih dalam setiap kegiatan politik. Disebutkan bahwa karakteristik sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya, dan karakteristik atau latar belakang sosiologis meliputi agama, domisili tempat tinggal, jenis kelamin, umur dan lainnya.

Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan pilihan politik dan sekaligus merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang. Disini peran tim sukses dari masing-masing calon mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat, mensosialisasikan keunggulan dari calon yang diusungnya dan visi-misi yang ditawarkan kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat dapat melihat kemampuan dari masing-masing calon yang akan menjadi pemimpinnya. Bukan sebaliknya malah melakukan tindakan yang keluar dari aturan dengan melakukan politik uang (*Money Politik*) penyebaran berita bohong (*Hoaks*) yang akan berakhir dengan kurungan penjara. Posisi pemerintah beserta Partai Politik yang berperan dalam tingkatan lebih atas juga

mempunyai tugas untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat secara umum, karena fenomena pertikaian yang muncul di beberapa media terkait dengan konflik politik menjadi konsumsi publik yang mudah diikuti oleh masyarakat sehingga masyarakat di akar rumput akan mudah terprovokasi dan menyebabkan perpecahan ditengah masyarakat karena berbeda pilihan.

Pendidikan politik harus dilakukan sejak dini lebih khusus kepada generasi muda melalui lembaga Pendidikan formal yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) karena anak usia SMA sudah memasuki usia dewasa yang juga akan ikut serta dalam proses demokrasi, maka hal tersebut penting dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang mampu berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, serta dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman konsep politik pada jenjang SMA sangat penting dilakukan agar mereka tidak mendapatkan pemahaman yang salah mengenai politik, pentingnya Pendidikan politik pada usia remaja dapat menentukan tingkat kesadaran politik seseorang, semakin awal seseorang mendapatkan Pendidikan politik maka akan mempengaruhi kesadaran politik seseorang tersebut untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik serta dapat memahami berbagai konsep dan simbol politik. Sehingga dapat memperbaiki tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik dan membentuk karakter kebangsaan yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Pendidikan politik dapat digunakan untuk membentuk karakter, watak dan tanggung jawab warga Negara yang demokratis sehingga dapat mencapai peradaban bangsa yang maju dan dapat dijadikan kiblat kehidupan dari bangsa-bangsa lain, pemuda mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan bangsa hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang berbunyi “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Nasional” inilah yang kemudian menjadi alasan betapa pentingnya Pendidikan politik diselenggarakan bagi generasi muda. Siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang politik di Sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila, karena pada dasarnya mata pelajaran ini dirancang untuk mendidik siswa untuk menjadi warga Negara yang baik (*good citizenship*) karena substansi materi didalamnya banyak menyangkut mengenai Pendidikan politik. Guru Pendidikan Pancasila merupakan aktor pendidik yang mempunyai tugas dalam memberikan pemahaman terkait dengan ilmu politik dalam lembaga Pendidikan formal, dengan itu guru Pendidikan Pancasila dituntut untuk mempunyai kompetensi dan profesionalitas dalam upaya menyampaikan materi tentang politik pada pelajaran Pendidikan Pancasila

Dewasa ini sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang cerdas, humanis, agamis, visioner dan toleran, disisi lain pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi baru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa dalam kurikulum pendidikan, hal tersebut mendapatkan jawaban setelah

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan visi-misi dalam bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024” (<https://ditpsd.kemdikud.go.id>: 2020)

Strategi pendidikan tersebut dituangkan dalam konsep Profil Pelajar Pancasila yang mempunyai beberapa ciri khusus dalam kurikulum pendidikan terbaru yakni kurikulum merdeka dan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah, begitu juga sebaliknya seorang tenaga pendidik harus memahami konsep tersebut dan kemudian mentransformasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). ciri khusus tersebut antara lain adalah : (a) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia (b) Berkebinekaan global (c) Bergotong royong (d) Mandiri (e) Bernalar kritis (f) Kreatif

Kehadiran strategi kebijakan nasional tersebut muncul sebagai respon terhadap keadaan generasi bangsa yang semakin jauh dari nilai-nilai kebudayaan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara, hal tersebut diakibatkan dari pengaruh globalisasi yang menggerogoti kepribadian bangsa sehingga mengakibatkan terjadinya *westernisasi* atau sebuah pola kehidupan masyarakat yang meniru gaya budaya barat, seperti gaya berpakaian, serta kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik contoh perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, pencurian,

perampasan, pemerasan, pencopetan. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban, narkoba, pelacuran dan hamil diluar nikah. (Kompas.com: 2022). Prilaku yang diekspresikan remaja tersebut jelas tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Pancasila).

Sedangkan persamasalahan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling (BK) Dra. Endang Wahyuni Eka pada (Kamis/02/03/2023) di SMAN 2 Sumenep terkait dengan kenakalan siswa secara umum yang sering terjadi di sekolah, bahwasanya yang sering terjadi siswa bolos artinya siswa tidak masuk ke sekolah yang menjadi langganan pihak konselor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa tersebut. Maka untuk merekontruksi pola kehidupan tersebut, perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda yakni siswa-siswi di sekolah tertentu untuk mengenal dan memahami kebudayaan dan kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa kita sebagai dasar pijakan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan globalisasi

Respon terhadap pengaruh globalisasi tersebut muncul sebuah konsep dengan istilah Kebhinekaan global, konsep tersebut tercantum dalam Strategi Pendidikan Nasional yang mempunyai harapan agar siswa dapat melihat perbedaan yang ada di segala penjuru dunia ini dengan penuh toleransi, mempunyai pemikiran yang terbuka serta tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan luhur, karena dengan sikap toleransi menjadi upaya dalam mencegah terjadinya konflik antar golongan secara khusus di Indonesia.

“Pendidikan multikultural yang diterapkan disekolah menawarkan satu alternatif melalui strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat” (Widiyanto, 2017: 110)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila Ibu Susmiyati S.Pd pada (Senin/06/03/2023) di SMA Negeri 2 Sumenep, peneliti menemukan corak keberagaman dimana siswa-siswinya berasal dari kalangan masyarakat yang berbeda-beda, baik dari aspek agama, budaya, suku, ras dan adat istiadat diantaranya terdiri dari keturunan bangsawan, arab, chindo dan madura. Maka penulis dapat menguraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Tabel Ragam Siswa

Jumlah Siswa	Agama	Jumlah	Suku
1.143 Siswa	Islam	Dominan	Madura
	Budha	1 (Satu)	Bali
	Kristen	9 (Sembilan)	China
			Arab

Sumber data: wawancara, Senin 06 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ainur Insan, S.Pd pada (Senin/13/2/2023) di SMA Negeri 2 Sumenep secara umum sekolah telah menerapkan strategi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk membentuk karakter siswa yang (a) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia (b) Berkebinekaan global (c) Bergotong

royong (d) Mandiri (e) Bernalar kritis (f) Kreatif. Program (P5) merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter peserta didik yang mempunyai kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu program (P5) yang telah dilaksanakan di sekolah penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tabel Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	
(P 5)	Kegiatan
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia	<ul style="list-style-type: none"> • Madrasah Diniyah (Madin) Setiap hari pagi pada hari kamis, Kajian fiqih • Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) kegiatannya adalah mengajih atau pembelajaran Al- Qur'an dan Kegiatan al-banjari • Shalat Jema'ah setiap hari
Berkebinekaan Global	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan ketua OSIS • Kegiatan Pramuka • Mengadakan upacara bendera setiap hari senin • Melestarikan budaya dengan ekstra kesenian
Bergotong Royong	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengerjakan projek yang telah ada siswa-siswi diminta untuk bekerja sama dengan temannya hal tersebut sebagai Langkah awal untuk menciptakan semangat gotong royong antar siswa
Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa-siswi diminta untuk menyelesaikan tugas belajar dengan cara mandiri tanpa bergantung dengan temannya
Bernalar Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat karya tulis • Diskusi kelompok

Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat karya tangan dengan memanfaatkan sampah plastic
---------	---

Sumber data : wawancara, Senin 13 Februari 2023

Perilaku politik siswa dapat dilihat dari proses pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS merupakan kontestasi atau pelajaran kegiatan politik pada siswa dalam rangka memilih ketua dalam penyelenggaraan kegiatan siswa disekolah, OSIS dapat secara fungsional dapat dikatakan sebagai Lembaga Eksekutif yang menyelenggarakan kegiatan kesiswaan. Dalam momen pemilihan ketua OSIS semua siswa diibaratkan sebagai masyarakat secara umum dengan begitu semua siswa mempunyai hak suara dalam memilih pasangan calon yang maju dalam kontestasi pemilihan ketua OSIS tersebut. kemudian dari masing-masing calon dapat menyampaikan visi-misinya terkait target apa saja yang perlu dilakukan siswa-siswi di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua OSIS SMAN 2 Sumenep, Saudara Moh. Tahsinol Anam. Partisipasi politik para siswa bisa dijalankan mulai dari pemilihan Ketua OSIS, ketua kelas maupun ketua di organisasi sekolah lainnya atau pramuka, hal tersebut juga merupakan bagian dari bentuk kegiatan politik siswa disekolah, pada pemilihan ketua OSIS terdapat partisipasi politik yang dibangun oleh semua siswa, memberikan hak suaranya memilih pasangan calon dalam menentukan pemimpin dari organisasi yang menjalankan kegiatan kesiswaan. Disisi lain, ada kalanya semua siswa mempunyai keinginan dalam menyampaikan aspirasinya kepada pejabat sekolah, dalam konteks ini penyampaian aspirasi dapat dilakukan siswa melalui pembuatan majalah dinding dan majalah smada secara kreatif sehingga selain

siswa dapat menyampaikan aspirasinya, siswa dapat membuat karya tulis yang membangkitkan potensi siswa-siswi. Aspirasi yang dimaksud ialah apabila kondisi sekolah tidak memberikan sarana dan prasarana kepada siswa dengan lengkap maka siswa dapat menyuarakan keadaan tersebut melalui karya tulis yang bisa menjadi media penyambung aspirasi siswa kepada pimpinan sekolah (hasil wawancara, 26/03/2023)

Kenyataan yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dan juga observasi awal dilapangan peneliti dapat menemukan kompetensi yang dimiliki oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam memberikan Pendidikan politik kepada siswa-siswinya dalam rangka mewujudkan karakter peserta didik yang toleran, mandiri, kerja sama antar teman-temannya tanpa memandang kasta yang dimilikinya. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari kemampuan personal yang dapat menggambarkan kepribadian yang dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadikan peserta didik sebagai subjek Pendidikan tidak lagi hanya sebagai objek Pendidikan, artinya dimana peran pendidik sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Maka dengan itu kami mencoba mengurai lebih dalam mengenai dengan peranan guru dalam memberikan pemahaman terkait dengan persoalan kebhinekaan global, dengan mengangkat judul **“Peran Guru PPKn dalam Implementasi Pendidikan Politik Berwawasan Kebhinekaan Terhadap Siswa Kelas XII SMA Negeri 2 Kabupaten Sumenep”** karena secara sosio

kultural, di daerah kota sumenep latar belakang penduduknya sangat beragam jadi secara tidak langsung banyak peserta didik yang sekolah di SMAN 2 tersebut yang berasal dari berbagai macam kalangan masyarakat. Dengan keberagaman tersebut tentunya timbul sikap-sikap tertentu dari antar siswa-siswi dan bagaimana sikap keseharian mereka dalam memberikan penghargaan terhadap teman-temannya yang berbeda latar belakang kehidupannya. Dari keadaan tersebut tentunya tenaga pendidik atau guru mempunyai strategi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar dilingkungan sekolah dengan nyaman.

B. Rumusan Masalah

Melihat kasus diatas maka penulis menemukan beberapa masalah pokok yang perlu diuraikan secara mendalam, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Kebhinekaan Yang Ada di Lingkungan Sekolah SMA 2 Sumenep ?
2. Bagaimana Peran Guru PPKn dalam Implementasi Pendidikan Politik Berwawasan Kebhinekaan Pada Pelajaran Pendidikan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Kebhinekaan yang Ada di Lingkungan Sekolah SMA 2 Sumenep
2. Untuk Mengetahui Peran Guru Dalam Implementasi Pendidikan Politik Berwawasan Kebhinekaan Pada Pelajaran Pendidikan Pancasila

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti dari hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat bermanfaat untuk semua pihak sebagai tambahan khazanah keilmuan secara khusus manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis

Berdasarkan proses penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membaca hasil penelitian ini, dalam hal menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam persoalan Pendidikan Politik dan dalam pemahaman mengenai adanya sifat alamia yang kita rasakan ini yakni kebhinekaan, bahwa begitu penting mempelajari bagaimana menjadi seorang warga Negara yang baik dalam memandang sebuah perbedaan yang ada, serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lainnya dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Bagi Siswa

Siswa dapat memahami pentingnya mempunyai pemikiran yang terbuka dalam memandang suatu perbedaan yang ada dalam kehidupan ini bahwa suatu perbedaan bukan sebab munculnya perpecahan melainkan perbedaan adalah kekayaan yang harus dipelihara demi mewujudkan kehidupan yang harmonis

b. Bagi Guru

Bagi tenaga pendidik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan pengetahuan untuk memberikan pelajaran

kepada siswa-siswi disekolah dalam upaya meningkatkan wawasan kebhinekaan global. Agar kemudian mempunyai rasa kepekaan sosial ketika melakukan interaksi dengan lingkungan masyarakat

c. Bagi Sekolah

Bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam upaya mendesain metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan wawasan kebhinekaan global terhadap siswa-siswi

d. Bagi Peneliti

penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan penulis bertujuan untuk memberikan informasi kepada setiap warga Negara untuk menjadi warga Negara yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multi interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka peneliti membatasi beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

“Menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan” (Majid, 2014: 6)

2. Pendidikan Politik

“Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga Negara” (Handoyo,2017: 9)

3. Pelajaran Pendidikan Pancasila

Pelajaran Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari warga Negara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela Negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial (Permendiknas, 2006).

4. Wawasan Kebhinekaan

Secara etimologis istilah “Wawasan Kebhinekaan” berasal dari kata wawasan dan kebhinekaan, wawasan sendiri adalah sebuah pandangan dan kebhinekaan adalah keberagaman masyarakat Indonesia yang meliputi Suku, Agama, Ras, Bahasa dan Adat Istiadat. (Pi'i, 2017:182)